

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta. Ladang Kata. 2020.
- Andasasmita, Komar. *Notaris II: Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*. Cetakan ke-2. Bandung. Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat. 1990.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-4. Jakarta. Rineka Cipta. 2004.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta. CV. GITAMA JAYA. 2003.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010.
- Fauzan, H. M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta. Kencana. 2014.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian I*. Buku ke-7. Bandung. Penerbit Alumni. 1995.
- Hardjowahono, Bayu Seto. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Cetakan ke-4. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abada Ke-20*. Bandung. Alumni. 1994.
- M, Devica Rully. *Titik-Titik Pertalian Dalam Hukum Perdata Internasional*. Jakarta. Universitas Esa Unggul. 2017.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press. 2020.
- Mustafa, Bachsan, Bega Ragawino, dan Yaya Priatna. *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung. Armico Bandung. 1985.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya. Airlangga University Press. 1998.
- dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya. Airlangga University Press. 2000.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung. Sumur Bandung. 1974.
- . *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*. Cetakan ke-3. Jakarta. PT. Pembimbing Masa. 1959.
- Purwadi, Ari. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya. Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2016.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, dkk. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Depansar. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2016.
- Rato, Dominikus. *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Cetakan ke-1. Surabaya. Laksbang Yustitia. 2016.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Seri Buku Ajar. Yogyakarta. Gama Media. 2017.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok. PT. Rajawali Buana Pusaka. 2021.
- Simanjuntak, P. N. H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Djambatan. 2009.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-4. Yogyakarta. Liberty. 1999.
- Soetami, Siti. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2020.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta. Liberty. 2000.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Graha Aksara. 2006.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Cetakan ke-3. Jakarta. Visimedia. 2008.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatang. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. 2018.
- Yulia. *Hukum Perdata Internasional*. Lhokseumawe. Unimal Press. 2016.

B. Jurnal

- ‘Aisy, Salsabila Rahadatul, Dzikrina Khusnaliani Atfan, Lailatul Fitri, Dakum, Puji Sulistyaningsih, dan Bambang Tjatur Iswanto. “Technical Note : Prosedur Perceraian Campuran Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA)”. *‘Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*

2. Nomor 1 (April 2024): 1-7. <https://ojs.um-palembang.ac.id/index.php/asabiyah/article/view/146>

Afridah, Yaswirman, Ferdi. “Kedudukan Harta Bersama Yang Terletak Di Luar Negeri (Singapura) Dari Perkawinan Campuran Yang Melakukan Perceraian Di Pengadilan Negeri (Studi Putusan No. 552/Pdt.G/2013/PN.DPS)”. *UNES Law Review* 6. Nomor 1 (September 2023): 3473-3485. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Ariyanti, Bella Fitria. “Perkawinan Campuran WNA dan WNI Tanpa Perjanjian Nikah Mengenai Hak Atas Penjualan Tanah”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2. Nomor 4 (April 2023): 313-319. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/index>

Aulia, Zahra Maulida dan Gunawan Djajaputra. “Pengaturan Hukum Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Pokok Agraria”. *UNES Law Review* 6. Nomor 4 (Juni 2024): 10873-10879. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Cassandra, Puti Ayu. “Status Harta Kawin Dari Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Yang Belum Dicatatkan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT.DKI)”. *Indonesian Notary* 2. Nomor 1 (2020): 32. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss1/32>

Dewi, Atika Sandra dan Isdiana Syafitri. “Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya”. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol* 5. Nomor 1 (Februari 2022): 179-191. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>

Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. “Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran”. *Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai* 16. Nomor 2 (Desember 2022): 153-160. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/977/828/>

Dwisana, I Made Arya dan Made Gde Subha Karma Resen. “Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Di Indonesia”. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6. Nomor 3 (Desember 2021): 561-577. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas>

Fortunella, Giovanna Calista, Budi Santoso, dan Ratih Dheviana Puru HT. “Keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri ditinjau dari hukum perdata internasional di indonesia”. *Brawijaya Law Student Journal*. (November 2017). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2655>

Granetta, Vio Valencia, Yunanto, dan Mujiono Hafidh Prasetyo. “Subtansi Perjanjian Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

- XIII/2015". *Notarius* 12. Nomor 2 (Desember 2019): 995-1003.
<https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29143>
- Gultom, Jhessica Hawana, Vernandito Sudharta R.T., Azriel Putra Ardhana, Destya Anggraeni, Adhito Martogi N.S., dan Imam Haryanto. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Perceraian Perkawinan Campuran Melalui Pendekatan Hukum Perdata Internasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.Sgr)". *Jurnal Ilmu Hukum* 1. Nomor 4 (Juli 2024): 256-266. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Ikhram, Dimas Assyakurrohim, Dewa Rusdy A Sirodj, M Win Afgani. "Metode Studi Kaus Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3. Nomor 1 (Februari 2023): 1-9.
<https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Jati, Imam Wahyu. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Untuk Perjanjian Kawin". *Aainul Haq: Jurnal Huum Keluarga Islam* 3. Edisi 1 (Juni 2023): 19-33. <https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/516>
- Kamil, Muhammad Ikhsan. "Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia". *JATISWARA* 36. Nomor 3 (November 2021): 296-304. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.326>
- Karimullah, Suud Sarim, Arif Sugitanata, dan Regita Amelia Cahyani. "Perkawinan Campuran Di Indonesia: Antara Kebutuhan atau Gaya Hidup". *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2. Nomor 1 (Januari 2022): 14-31. <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.38>
- Martinelli, Imelda, Zefanya Angellin Chen, Vanessa, dan Felicia Amanda Sulistio. "Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional Pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda, dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran". *Jurnal Kewarganegaraan* 8. Nomor 1 (Juni 2024): 566-587. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6353>
- Nastiti, Rafiq Awwalin dan Agus Saron. "Upaya Hukum Suami Istri Atas Perjanjian Perkawinan Yang Telambat Dicatatkan". *Notarius* 16. Nomor 2 (2023): 823-838. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41263>
- Nurwanto, Arie dan Ida Hanifah. "Tinjauan Yuridis Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Komparatif KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 3. Nomor 3 (2022): 278-287. <https://doi.org/10.55357/is.v3i3.316>
- Pakpahan, Margaretha Uly. "Apostille's Effect On Doing Business In Indonesia". *Journal of Private Internasional Law Studies* 1. Nomor 1 (Januari 2024): 3. <https://doi.org/10.211143/JPILS.v1i1.1003>

- Pratama, Yudha. “Keputusan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pencatatan Perkawinan”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) 1*. Nomor 4 (Desember 2021): 1-14. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/812>
- Pratiwi, Desak Putu Kania, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini. “Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan dalam Perkawinan Campuran”. *Jurnal Konstruksi Hukum 1*. Nomor 2 (Oktober 2020): 271-275. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2590.271-275>
- Prasetyo, Stevanus Bhakti. “Ambiguitas Amanat Konstitusi Mengesahkan Perjanjian Kawin Oleh Notaris Dan Pegawai Pencatat Perkawinan”. *Jurnal Education and Development 11*. Nomor 1 (Januari 2023): 235-240. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4377>
- Prastyawan, Yoga Nasa. “Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia”. *Media Of Law And Sharia 2*. Nomor 4 (2021): 316-328. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12813>
- Puteri, Erriyanti Samuhedah dan Meliyana Yustikarini. “Pemisahan Harta Bersama Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran (*Mixed Marriage*)”. *Wajah Hukum 8*. Nomor 1 (April 2024): 1-7. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1343>
- Ramadhanti, Gita, Nurul Elmiyah, dan Lauditta Humaira. “Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.449/PDT/2016/PT.BDG)”. *Lex Patrimonium 2*. Nomor 4 (Mei 2023): 7. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss1/7/>
- Rivanda, Fira Adhisa dan Gemala Dewi. “Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran”. *Acta Comitas 7*. Nomor 2 (Agustus 2022): 216-228. <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p4>
- Romli, Muhammad. "Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam 6*. Nomor 2 (2021): 206-216. <https://doi.org/10.52802/wst.v6i2.330>
- Scolastika, Sheanny, Gavrilla Theodora, Olga Nadina, dan Tsamara Probo Ningrum. “Kebiasaan Pencatatan Perkawinan Diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa 14*. Nomor 2 (Juli 2020): 139-146. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>
- Sengkey, Michael Sima dan Widodo Suryandono. “Implikasi Keabsahan Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Yang Belum Didaftarkan Di Indonesia Terhadap Proses Jual Beli Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 851/PDT.G/2016/PN.DPS. tahun 2017)”. *Indonesian Notary 1*. Nomor 004 (Juni 2020). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2984245>

- Situmeang, Paima. “Implikasi Perjanjian Kawin Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campur”. *Recital Review* 1. Nomor 2 (Juli 2019): 117-131. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/7457>
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2. Nomor 1 April (2020): 193-199. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>
- Werdiningsih. “Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (*Post Nuptial Agreement*): Konsep Kepastian Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga”. *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4. Nomor 1 (Mei 2023): 45-64. <https://doi.org/10.19184/JIK.v4i1.38537>
- Wiguna, I Gede Wardana Oka Sastra, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Putu Gede Saputra, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran”. *Jurnal Konstruksi Hukum* 1. Nomor 1 (September 2020): 157-163. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2149.157-163>
- Yandra, Olivia Fitrah Rulvi dan Ratih Widowati. “Analisis Hukum Tentang Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Yang Dibuat Setelah Menikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 379/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69-PUU/XIII/2015)”. *Lex Certa* 5. Nomor 1 (2019): 36-54. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/lexcerta/article/view/1581>
- Yulianto, Yuridha Rizama. “Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berupa Hak Guna Bangunan Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0391/Pdt.G/2017/PA.DP)”. *Indonesian Notary* 2. Nomor 3 (September 2020): 36. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/36>
- Zahara, Delia Astrid dan Antarin Prasanthi Sigit. “Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Didaftarkan Pada Saat Proses Perceraian”. *UNES Law Review* 6. Nomor 2 (Desember 2023): 4870-4890. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

C. Artikel, Karya Ilmiah, Kamus, dan Makalah

- Batu, Daniel Jeffry Lumban, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Dari Akibat Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015)”. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 2019.
- N, Gloria Masniar Hosana. “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Yang Dibuat Di luar Wilayah Negara Indonesia Setelah Perkawinan Berlangsung”. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. 2021.

Rahmatika, Azka Aulia. “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada perkawinan Campuran (Studi: Kasus Perkara Nomor 941/PDT.G/2019/PA.BTM, Nomor: 50/PDT.G/PTA.PBR, dan Nomor: 424/K/AG/2021)”. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas. 2022.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Lembaran Negara Nomor 232 Tahun 2013.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lembaran Negara Nomor 184 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Nomor 28 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Berita Negara Nomor 125 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Berita Negara Nomor 1789 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pada Dokumen Di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berita Negara Nomor 735 Tahun 2020.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974 tertanggal 9 November 1976 terkait Putusan Yurisprudensi Tentang Ketentuan Harta Bersama Dalam Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 terkait Putusan Yurisprudensi Tentang Ketentuan Melegalisasi Surat Yang Di Buat Di Luar Negeri

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/2017 tertanggal 19 Oktober 2017 terkait Putusan Pada Tingkat Kasasi Dalam Sengketa Harta Bersama Antara Alim Lim dan Ika Heru Bethari

Putusan Mahkamah Agung Nomor 495 PK/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 terkait Putusan Pada Tingkat Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Harta Bersama Antara Alim Lim dan Ika Heru Bethari

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

F. Internet

Advocacy, Nayara. “Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap Pekawinan WNI”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni-lt5847e8ddabfea/>.
(diakses pada tanggal 26 Mei 2024).

Bahan Ajar Hukum Perdata Internasional pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia,
<https://spada.unprimdn.ac.id/course/view.php?id=1987>, (diakses pada 05 Juni 2024)

Hasanah, Sovia. “Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28/>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2023).